

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI DAN INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN EMPLOYABILITY MAHASISWA

IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN COOPERATION BETWEEN HIGHER EDUCATION AND GOVERNMENT AGENCIES TO IMPROVE STUDENT EMPLOYABILITY

Rio Patti Rafsanjani¹, Rudiana², Jovanscha Qisty Adinda³

^{1,3}Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran-Indonesia

²Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran-Indonesia

*Korespondensi: Rio Patti Rafsanjani. Email: rio21004@mail.unpad.ac.id

(Diterima: 23-01-2025; Ditelaah: 04-02-2025; Disetujui: 19-04-2025)

ABSTRACT

Rapid technological developments have significantly changed the landscape of the world of work, causing a shrinking job market and increasing competition in the labor market. The employability of students is a key factor in determining their readiness to compete in an increasingly dynamic world of work. This study aims to analyze and describe the implementation of cooperation between Padjadjaran University and government agencies in improving student employability. The research method used is applied research with a qualitative descriptive approach, and the data source in this study was obtained through direct interviews with the Head of the Career Development Center of Padjadjaran University. The results of the study indicate that the communication process in the implementation of cooperation has been running effectively by prioritizing aspects of transmission, clarity, and consistency. Unpad has managed human and financial resources well, involving PPK staff, interns, and additional staff from government agencies. Padjadjaran University shows commitment and positive responses when establishing cooperation with various partners. The bureaucratic structure, including SOPs and division of tasks between units, has been running quite well with assignments that are in accordance with the capabilities of each individual. However, the process of submitting cooperation through formal bureaucracy takes a long time, so proactive communication is needed in the form of monitoring and confirmation of the status of the application until the implementation of the activity. Another novelty of this study lies in identifying administrative and technical barriers to implementing cooperation between Unpad and government agencies. This study also provides an in-depth analysis of strategies that can be applied to optimize the effectiveness of cooperation programs to improve student readiness in the world of work.

Keywords: Career Development Center, Student Employability, University Cooperation, Collaboration

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah lanskap dunia kerja secara signifikan, menyebabkan penyusutan lapangan kerja dan meningkatnya persaingan di pasar tenaga kerja. *Employability* mahasiswa menjadi faktor kunci dalam menentukan kesiapan mereka untuk bersaing di dunia kerja yang semakin dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kerjasama Universitas Padjadjaran dengan instansi pemerintah dalam meningkatkan *employability* mahasiswa. Metode Penelitian yang digunakan adalah riset terapan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Pusat Pengembangan Karir Universitas Padjadjaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam pelaksanaan kerja sama sudah berjalan efektif dengan mengedepankan aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Unpad telah mengelola sumber daya manusia dan keuangan dengan baik, melibatkan staf PPK, mahasiswa magang, serta tenaga tambahan dari instansi pemerintah. Universitas Padjadjaran menunjukkan komitmen dan respons positif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai mitra. Struktur birokrasi, termasuk SOP dan pembagian tugas

antar unit, telah berjalan cukup baik dengan penugasan yang sesuai kapabilitas masing-masing individu. Namun, proses pengajuan kerja sama melalui birokrasi formal memerlukan waktu yang panjang, sehingga diperlukan komunikasi proaktif berupa pemantauan dan konfirmasi status pengajuan hingga pelaksanaan kegiatan. Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada identifikasi hambatan administratif dan teknis dalam pelaksanaan kerja sama antara Unpad dan instansi pemerintah. Studi ini juga memberikan analisis mendalam mengenai strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas program kerja sama guna meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

Kata kunci: *Employability* Mahasiswa, Kerja Sama Perguruan Tinggi, Kolaborasi, Pusat Pengembangan Karir,

Rafsanjani, R.P., Rudiana., & Adinda, J.Q. (2025). Implementasi Kebijakan Kerja Sama Universitas Padjadjaran dengan Instansi Pemerintah dalam Meningkatkan *Employability* Mahasiswa. *Jurnal Governansi*, 11(1): 91-102.

PENDAHULUAN

Dalam dunia kerja yang semakin kompetitif akibat kemajuan teknologi, mahasiswa diharapkan memiliki *employability*, yaitu seperangkat keterampilan, pemahaman, dan atribut pribadi yang meningkatkan peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang memuaskan dan mendukung kesuksesan karir (Tushar & Sooraksa, 2023). Bagi mahasiswa, pengembangan karier yang berfokus pada penguasaan kompetensi menjadi hal penting untuk memberikan tambah di mata pemberi kerja (Purnama et al., 2024).

Pendidikan tinggi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki keahlian akademik atau profesional serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sihite & Saleh, 2019). Dalam mendukung tujuan tersebut, perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan *employability* mahasiswa melalui pendidikan yang relevan dengan dunia kerja, penelitian inovatif, pengabdian masyarakat, kerja sama dengan industri, dan tata kelola yang baik.

Universitas Padjadjaran, sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya. Status ini memungkinkan Unpad

merancang kebijakan yang mendukung pengembangan *employability* mahasiswa melalui pendidikan relevan, penelitian inovatif, pengabdian masyarakat, kerja sama industri, dan tata kelola yang baik. Berdasarkan *QS World University Rankings* 2024, Universitas Padjadjaran menempati peringkat ke-596 dunia, dengan reputasi pemberi kerja sebagai salah satu indikator utama.

Reputasi ini diukur melalui survei global terhadap pemberi kerja mengenai institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan berkualitas (Lane, 2024). Untuk mendukung indikator tersebut, Unpad membentuk Pusat Pengembangan Karier di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni. Pusat ini bertindak sebagai penghubung strategis antara mahasiswa, alumni, perusahaan, dan instansi pemerintah.

Dengan memanfaatkan status PTN-BH, Unpad menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan, guna memastikan lulusan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja (Wijiharta et al., 2021). Kemitraan ini dilandasi Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerja Sama, yang berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kesetaraan.

Komunikasi yang efektif antara Unpad dan sejumlah instansi pemerintah berperan penting dalam keberhasilan kerjasama

strategis dalam meningkatkan *employability* mahasiswa. Namun, observasi lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kerja sama antara Unpad dan instansi pemerintah. Pertama, proses komunikasi dengan instansi pemerintah terkait pelaksanaan program kerja sama mengalami negosiasi yang cukup panjang untuk menemukan waktu yang sesuai dan saling menguntungkan. Kedua, proses pengajuan kerja sama melalui surat resmi kepada rektor memakan waktu lama. Terakhir, jadwal pelaksanaan program kerja sama sering ditentukan oleh timeline instansi pemerintah, sehingga sulit untuk disesuaikan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi kerja sama antara Universitas Padjadjaran dengan instansi pemerintah ini, yang difokuskan pada peran Pusat Pengembangan Karir Universitas Padjadjaran dalam upaya meningkatkan *employability* mahasiswa. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kerja sama Universitas Padjadjaran dengan instansi pemerintah dalam meningkatkan *employability* mahasiswa.

MATERI DAN METODE

Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan (Mukarom et al., 2018). Sementara itu, Van Meter dan Van Horan dalam Pasaribu (2021) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mewujudkan hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan sebelumnya. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan

bahwa implementasi adalah penerapan kebijakan yang berkaitan erat dengan perencanaan dan pelaksanaan program oleh organisasi atau instansi yang bertanggung jawab.

Menurut Edwards dalam Sallolo et al (2022) keberhasilan implementasi kebijakan publik bergantung pada empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pertama adalah faktor komunikasi, dimana komunikasi yang efektif memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan prosedur kebijakan dipahami dengan jelas oleh para pelaksana (Roring et al., 2021). Selanjutnya yaitu faktor sumber daya, dimana sumber daya mencakup aspek manusia, finansial, dan material yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan (Rorimpandey & Nurdin, 2019).

Ketiga yaitu faktor disposisi, yaitu sikap dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi (Laary et al., 2022). Terakhir yaitu struktur birokrasi, dimana agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efektif, birokrasi harus mendukungnya secara positif melalui koordinasi yang baik (Agustino, 2016).

Employability

Employability merujuk pada kemampuan individu untuk memperoleh dan mempertahankan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi, keterampilan, serta kompetensi yang dimilikinya. Kemampuan ini mencakup kesiapan individu dalam mengembangkan keterampilan interpersonal, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, serta adaptabilitas, disertai pemahaman yang baik terhadap kebutuhan dan tuntutan dunia kerja di pasar tenaga kerja (Cheng et al., 2022).

Keterampilan *employability* sangat penting mengingat karakteristik pekerjaan saat ini menuntut inisiatif, fleksibilitas, dan

kemampuan untuk menangani berbagai jenis tugas. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan seorang pekerja tidak harus terlalu spesifik, melainkan lebih berorientasi pada layanan, serta mengutamakan kemampuan sosial yang tinggi agar dapat berinteraksi dan berkolaborasi secara efektif dalam lingkungan kerja (Sunardi et al., 2016).

Menurut Fitri & Khalid (2024) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi *employability*, yaitu kepercayaan diri, *soft skill*, dan dukungan sosial. Kepercayaan diri diartikan sebagai keyakinan positif seseorang terhadap kemampuan, kualitas, dan nilai-nilai dalam dirinya yang membantunya menghadapi tantangan serta mengatasi berbagai situasi (Auliya, 2020). Selanjutnya, *soft skill* merupakan sekumpulan atribut personal dan keterampilan antar pribadi yang memungkinkan individu berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan orang lain (Ratuela et al., 2022). Sementara itu, dukungan sosial mencakup berbagai bentuk bantuan yang dapat memberikan rasa nyaman dan meningkatkan kepercayaan diri individu (Indrayana & Kumaidi, 2021).

Peran Kerja Sama Perguruan Tinggi dengan Pemerintah dalam Meningkatkan Employability

Perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan besar untuk tidak hanya menyediakan pendidikan yang relevan, tetapi juga memastikan bahwa lulusannya memiliki keterampilan dan kompetensi yang mampu bersaing serta sukses dalam dunia kerja (Indriati & Djaddang, 2024). Hal ini menuntut universitas untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar kerja yang dinamis agar dapat menciptakan lulusan yang sesuai dengan tuntutan industri.

Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah menjalin kolaborasi dengan institusi eksternal, termasuk lembaga pemerintah dan industri (Borah et al., 2021). Kolaborasi

ini tidak hanya meningkatkan relevansi program akademik dan kualitas lulusan, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap penguatan reputasi perguruan tinggi sebagai institusi yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Metode Penelitian

Penelitian riset terapan ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi atau fenomena tertentu sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Zellatifanny & Mudjiyanto (2018) juga menyatakan jika penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan akurat karakteristik suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Pusat Pengembangan Karier Universitas Padjadjaran serta perangkat lainnya yang terlibat dalam kegiatan operasional di Pusat Pengembangan Karier Unpad. Proses pengumpulan data utama dilakukan melalui observasi, wawancara, serta studi kepustakaan terpercaya untuk memperkuat validitas data yang diperoleh.

Sementara itu, peneliti akan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan, yaitu metode pemilihan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020). Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai implementasi kerja sama antara Universitas Padjadjaran dan instansi pemerintah di Pusat Pengembangan Karier Unpad.

Tabel 2. Daftar Informan

No.	Informan	Informasi yang Diharapkan	Jumlah
1.	Kepala Pusat Pengembangan Karier Unpad	Informasi mengenai kebijakan PPK Unpad dalam pelaksanaan kerja sama dengan	1 orang

		instansi pemerintah	
2.	Staf Tim Eksternal Pusat Pengembangan Karier Unpad	Informasi mengenai proses komunikasi dan kerja sama antara PPK Unpad dengan instansi pemerintah	1 orang

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III yang menilai keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi digunakan untuk mengukur sejauh mana pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Faktor sumber daya bertujuan untuk mengidentifikasi jenis sumber daya yang tersedia dan mendukung pelaksanaan kebijakan. Faktor disposisi mengacu pada sikap dan komitmen pihak-pihak terkait dalam mendukung kebijakan tersebut. Sementara itu, faktor struktur birokrasi bertujuan untuk menilai pengaturan dan prosedur birokrasi dalam mendukung implementasi kebijakan agar berjalan secara efektif.

Komunikasi

Menurut teori dan model implementasi kebijakan dari Edward III dalam Laary et al (2022) komunikasi adalah elemen penting dalam suatu kebijakan publik. Dalam teori Edward III menekankan bagaimana kebijakan dikomunikasikan dengan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, proses komunikasi dalam pelaksanaan kerja sama antara Universitas Padjadjaran dan instansi pemerintah dimulai ketika surat pengajuan kerja sama yang dikirimkan oleh instansi pemerintah diterima oleh Rektor Universitas Padjadjaran. Selanjutnya,

komunikasi ini melibatkan Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni serta Kepala PPK Unpad bersama perwakilan instansi pemerintah untuk mengadakan diskusi terkait penyelenggaraan program kerja sama. Pembahasan tersebut mencakup pedoman kegiatan, harapan, dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala PPK Unpad:

“Setelah ada surat, saya terkadang dengan Direktur membuat meeting mengenai hal-hal yang menjadi guidance dan target kegiatan, dimana harus memberi impact positif untuk kedua institusi. Setelah itu kita bahas mengenai apa yang diharapkan dan ditawarkan oleh instansi pemerintah tersebut kepada mahasiswa Unpad, entah itu berupa opportunity atau informasi seputar karir yang bisa dikembangkan.”

Namun, proses komunikasi ini menghadapi kendala dalam penyesuaian jadwal antar pimpinan lembaga. Padatnya agenda dan kesibukan pimpinan kedua belah pihak menyebabkan proses negosiasi jadwal berlangsung cukup lama untuk menemukan waktu yang sesuai dan saling menguntungkan. Kepala PPK Unpad menjelaskan:

“Kita harus tanyakan jadwal dari pimpinan Unpad apakah match dengan jadwal yang mereka tawarkan. Biasanya terus terjadi negosiasi apakah akan pindah jadwal atau tidak sehingga salah satu opsinya mengganti hari dan tanggal, itu yang biasanya menjadi tantangan. Selain itu juga memastikan siapa yang membuka acara, jika dari Kementerian yang hadir Menteri/Wakil Menteri biasanya apple to apple dengan Rektor. Tapi seringkali Rektor Unpad tidak dapat menghadiri karena jadwalnya tidak match. Hal-hal tersebut biasanya menjadi tantangan karena dari PPK harus selalu update dengan informasi siapa perwakilan yang hadir dari kedua institusi karena berkaitan dengan protokoler.”

Kendala tersebut dapat diatasi oleh proses komunikasi antara Universitas Padjadjaran dan instansi pemerintah yang berlangsung cukup panjang di tingkat pimpinan sebelum informasi tersebut diteruskan kepada mahasiswa magang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tujuan kebijakan disampaikan dengan jelas dan tidak ambigu, sesuai dengan aspek kejelasan pada teori implementasi kebijakan. Kepala PPK Unpad juga menegaskan:

“Tentu komunikasi sudah dijalin dengan baik hingga kemudian bisa menyelenggarakan suatu kegiatan yang komprehensif, rapi dan impactful. Komunikasi yang dijalin tersebut tidak singkat dan tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali dilakukan.”

Mengacu pada aspek transmisi dalam teori implementasi kebijakan, informasi mengenai kegiatan harus disampaikan kepada semua pihak yang terlibat agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, proses komunikasi antara Unpad dan instansi pemerintah yang pada dasarnya bersifat top-down sudah cukup baik, di mana rangkaian informasi disampaikan secara berurutan mulai dari pimpinan Unpad hingga mahasiswa magang. Kepala PPK Unpad menyatakan:

“Kemudian turun instruksi atau informasi mengenai kegiatan kepada mahasiswa magang setelah melalui proses-proses sebelumnya.”

Sehingga komunikasi antara antara Unpad dan instansi pemerintah sudah cukup baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Posangi et al (2020) suatu kebijakan publik akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan . Hasil tersebut juga sesuai dengan teori Edward III dalam Laary et al (2022) yang menyatakan bahwa terdapat tiga aspek penting dalam dimensi

komunikasi, yaitu: (1) transmisi, yang merujuk pada metode penyampaian informasi kepada publik, (2) kejelasan, yakni sejauh mana informasi dapat dipahami dengan baik, dan (3) konsistensi, yang berkaitan dengan kesinambungan dalam penyampaian informasi.

Sumber Daya

Menurut teori implementasi kebijakan dari Edward III dalam Tiwa et al (2023) setiap kebijakan perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dalam aspek sumber daya manusia maupun finansial. Sumber daya manusia mencakup jumlah serta kualitas pelaksana kebijakan yang mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran. Sementara itu, sumber daya finansial merujuk pada ketersediaan modal yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program atau kebijakan. Kedua aspek ini harus diperhatikan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam penyelenggaraan sebuah program kerja sama dengan instansi pemerintah, Universitas Padjadjaran melalui Pusat Pengembangan Karier memiliki sumber daya manusia yang cukup baik, terdiri dari staf PPK Unpad, mahasiswa magang, serta sumber daya manusia dari pihak instansi pemerintah. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala PPK Unpad:

“Tiap kegiatan tentunya ada tim dari PPK yang terlibat sejumlah 3 orang sesuai dengan tupoksinya masing-masing ditambah 1-2 orang dari tim Kemahasiswaan untuk membantu dan sejumlah mahasiswa magang yang bisa bertugas pada hari-H”.

Tabel 3. Data Mahasiswa Magang PPK Unpad

No.	Divisi	Jumlah Mahasiswa
1.	<i>Event Management</i>	13 orang
2.	<i>Graphic Design</i>	8 orang

3.	<i>Administration</i>	6 orang
4.	<i>Tracer Study-User Sruudy</i>	4 orang
5.	<i>Human Relation</i>	4 orang
6.	<i>Social Media</i>	8 orang

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan Tabel 3 Data Mahasiswa Magang PPK Unpad, terdapat 6 (enam) divisi mahasiswa magang yang mendukung operasional PPK Unpad. Namun, penempatan mahasiswa magang yang bertugas dalam penyelenggaraan program tersebut difokuskan hanya kepada divisi-divisi yang terkait, yaitu *Event Management*, *Administration*, dan *Social Media*. Kepala PPK Unpad menjelaskan:

“Ditambah dengan sejumlah mahasiswa intern yang bisa bertugas pada hari-H atau yang sudah mengawal kegiatan dari awal.”

Dari sisi sumber daya keuangan, program kerja sama ini didukung penuh oleh instansi pemerintah terkait. Bantuan mencakup penyediaan kebutuhan kegiatan, seperti *merchandise*, konsumsi, dan kebutuhan lain yang diperlukan selama acara berlangsung. Kepala PPK Unpad menuturkan:

“Mengenai anggaran, semua kegiatan mostly disupport oleh Kementerian, entah itu mereka akan support souvenir atau konsumsi yang akan dibagikan kepada peserta. Ketika kita kerja sama maka yang support biayanya adalah instansi pemerintah tersebut karena biasanya standar Kementerian sudah baik.”

Namun, kendala muncul pada aspek sarana dan prasarana yang terkait dengan ketersediaan ruang kegiatan. Jadwal kegiatan yang ditentukan oleh instansi pemerintah terkadang tidak sesuai dengan ketersediaan ruangan di kampus. Hal ini menyebabkan PPK Unpad harus menyesuaikan tempat kegiatan atau melakukan perubahan jadwal. Kepala PPK Unpad mengungkapkan:

“Seringkali dari Kementerian jadwalnya sudah ada, jadi kita yang adjust. Biasanya terus terjadi negosiasi apakah pindah tanggal karena ruangnya dipakai. Mereka inginnya Bale Sawala, tapi Bale Sawala di tanggal yang diinginkan digunakan, maka opsinya menggunakan ruangan lain atau mengganti hari dan tanggal. Nah itu yang biasanya menjadi kendala.”

Untuk mengatasi hal tersebut, PPK Unpad memberikan beberapa pilihan ruang alternatif kepada pihak instansi, seperti Bale Sawala, Bale Santika, atau Auditorium Fikom. Meskipun demikian, kebanyakan instansi tetap memilih Bale Sawala karena kapasitas dan standar ruangnya sesuai kebutuhan mereka. Kepala PPK Unpad menambahkan:

“Pada saat sebelum kegiatan, mereka akan melakukan checking lokasi yang bagus untuk diadakan kegiatan tersebut. Biasanya kita memberikan beberapa opsi, ada Bale Sawala, Bale Santika, Auditorium Fikom. Biasanya pilihannya selalu Bale Sawala yang berjumlah 220 kursi. Tapi kalo memang penuh, mahasiswa bisa duduk di tangga-tangga yang bisa menyentuh 300. Jika pesertanya masih banyak, disediakan kursi di luar dan fasilitas streaming.”

Disposisi

Menurut teori implementasi kebijakan dari Edward III dalam Laary et al (2022) disposisi merujuk pada keinginan, kemauan, serta kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan dan merealisasikan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Sebagai faktor ketiga dalam implementasi kebijakan, proses disposisi memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Universitas Padjadjaran, sebagai institusi pendidikan yang memegang kebijakan kerja sama eksternal, bersikap selektif dalam menentukan mitra yang akan diajak bekerja sama. Unpad melakukan proses kurasi terhadap setiap tawaran kerja

sama berdasarkan dampaknya bagi mahasiswa dan alumni. Melalui PPK Unpad, komitmen untuk meningkatkan *employability* mahasiswa dan alumni diwujudkan dalam berbagai program kerja sama yang bermanfaat. Sejalan dengan yang disampaikan kepala PPK Unpad:

“Tawaran kerja sama yang datang ke kita akan dikurasi. Kita kurasi berdasarkan ketersediaan gedung serta availability tanggal. Tidak mungkin kita mengadakan acara saat ujian, karena tujuan kita memberi informasi kepada mahasiswa dan lulusan. Selain itu, kita akan lihat impact dan peluangnya seperti apa, bagaimana kans alumni kita dapat diterima kerja serta hal-hal yang bisa memberikan impact terhadap employability mahasiswa Unpad.”

Selain komitmen, Unpad juga menjunjung tinggi integritas dalam menjalin kerja sama. Hal ini berarti bahwa mitra yang diajak bekerja sama harus memiliki integritas yang setara. Kredibilitas calon mitra dinilai berdasarkan rekam jejak, nama baik, serta pengalaman kerja sebelumnya dengan Unpad. Kepala PPK Unpad menyampaikan:

“Kita juga lihat kredibilitas dari institusi-institusi tersebut. Apakah mereka sudah punya rekam jejak belum dengan Unpad sebelumnya? Atau apakah ini menjadi pintu gerbang pembuka untuk kerja sama? Itu juga menjadi guidance kita untuk menyelenggarakan kegiatan.”

Universitas Padjadjaran memiliki banyak mitra strategis, baik dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah, yang menawarkan berbagai bentuk kerja sama. Meski begitu, Unpad tidak hanya terbatas pada kerja sama dengan instansi pemerintah, tetapi juga membuka diri terhadap peluang kolaborasi dengan lembaga swasta, institusi pendidikan lainnya, dan pelaku bisnis. Hal ini ditegaskan oleh Kepala PPK Unpad:

“Kita tidak bisa terlalu fokus di instansi pemerintah terus-terusan, kita harus berbagi

juga dengan corporate-corporate lain. Selain itu kita harus berbagi dengan tempat penyelenggara beasiswa karena kita juga concern ke S2. Belum lagi kita harus memberikan slot kepada pebisnis yang ingin berbagi kegiatan bisnis mereka. Banyak topik yang kita hadirkan, tidak semua kegiatan-kegiatan dari instansi pemerintah.”

Struktur Birokrasi

Menurut teori implementasi kebijakan dari Edward III dalam Tiwa et al (2023) struktur birokrasi terdiri dari dua aspek utama, yaitu: (1) mekanisme atau prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) yang mengatur pelaksanaan kebijakan, serta (2) struktur organisasi yang mencakup pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan.

Prosedur pelaksanaan kerja sama antara Universitas Padjadjaran dan mitra eksternal, baik dari instansi pemerintah maupun lembaga swasta adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan surat resmi oleh instansi terkait kepada pimpinan universitas, dalam hal ini Rektor Unpad.
2. Rektor Unpad memberikan disposisi kepada Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni
3. Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni melanjutkan disposisi kepada Pusat Pengembangan Karier Unpad

Selain prosedur formal ini, terdapat pula prosedur informal yang dilakukan melalui komunikasi langsung kepada Kepala PPK Unpad, terutama jika mitra tersebut sudah pernah bekerja sama sebelumnya atau terdapat alumni Unpad yang bekerja di instansi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala PPK Unpad:

“Karena saya sudah punya mitra dan sebelumnya sudah kenal, maka mereka akan komunikasi informal dengan saya. Tetapi surat tetap ditujukan kepada Rektor. Atau biasanya saya mencari, karena kita punya

alumni yang tersebar di Kementerian manapun."

Namun, prosedur formal yang berlangsung dari tingkat atas ke bawah membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum sampai ke PPK Unpad, sehingga dapat berdampak pada singkatnya waktu persiapan kegiatan. Untuk mengatasi hal tersebut, PPK Unpad menerapkan strategi komunikasi proaktif dengan memantau dan mengkonfirmasi keberadaan surat kerja sama melalui Sekretaris Rektor. Kepala PPK Unpad menjelaskan:

"Kita di tingkat PPK bisa mengamati dan menanyakan surat tersebut sudah sampai mana melalui Sekretaris Rektor, karena biasanya sebelum kirim surat instansi tersebut menghubungi saya kalau sudah mengirimkan surat kepada Rektor. Disamping itu, kita mempersiapkan hal-hal teknis terkait kegiatan."

Selain itu pembagian tugas dan wewenang di internal PPK Unpad tergolong cukup baik. PPK Unpad memiliki sumber daya manusia yang memadai dengan kapabilitas yang sesuai, sehingga koordinasi berjalan lancar dan tidak terjadi tumpang tindih tugas. Pembagian peran dilakukan secara jelas, terutama oleh divisi Event Management yang dipimpin oleh seorang manajer. Manajer bertugas membagi tugas sesuai peran masing-masing anggota magang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Divisi Event Management juga berkolaborasi dengan divisi lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program kerja sama. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala PPK Unpad:

"Tentunya diperlukan tim yang solid untuk kita berbagi peran. Tidak mungkin kita mengadakan kegiatan jika kita tidak punya tim yang support."

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian melalui praktek kerja magang dan wawancara, serta

analisis pembahasan terkait implementasi kerja sama antara Universitas Padjadjaran dan instansi pemerintah dalam meningkatkan employability mahasiswa melalui Pusat Pengembangan Karier Universitas Padjadjaran, dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan cukup baik, meskipun masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan kerja sama sudah berjalan efektif dengan mengedepankan aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Komunikasi top-down dari pimpinan hingga mahasiswa magang berlangsung runtut dan jelas, meskipun di tingkat pimpinan terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk menjaga kejelasan dan mencegah ambiguitas informasi.

Dalam aspek sumber daya, Unpad telah mengelola sumber daya manusia dan keuangan dengan baik, melibatkan staf PPK, mahasiswa magang, serta tenaga tambahan dari instansi pemerintah. Dukungan keuangan juga mencakup honorarium, merchandise, dan konsumsi yang difasilitasi oleh instansi terkait. Namun, kendala pada ketersediaan prasarana, seperti kesesuaian jadwal kegiatan dengan ruangan di kampus, memerlukan negosiasi yang matang serta penyediaan alternatif ruang kegiatan agar program dapat berjalan optimal.

Dari segi disposisi, Universitas Padjadjaran menunjukkan komitmen dan respons positif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, meskipun selektif untuk menjaga integritas dan objektivitas demi memastikan dampak positif bagi mahasiswa dan alumni.

Struktur birokrasi, termasuk SOP dan pembagian tugas antar unit, telah berjalan cukup baik dengan penugasan yang sesuai kapabilitas masing-masing individu. Namun, proses pengajuan kerja sama melalui birokrasi formal memerlukan waktu yang panjang, sehingga diperlukan komunikasi proaktif berupa pemantauan

dan konfirmasi status pengajuan hingga pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, implementasi kerja sama ini menunjukkan hasil yang positif, tetapi perbaikan pada aspek komunikasi, sarana prasarana, dan efisiensi birokrasi perlu terus diupayakan agar implementasi program semakin optimal dan berdampak signifikan bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Auliya, N. N. (2020). Pengaruh Persepsi Kesempatan Kerja dan Kepercayaan Diri Terhadap Kesiapan Kerja. *Psikoborneo*, 8(2), 283–288.
- Borah, D., Malik, K., & Massini, S. (2021). Teaching-focused university–industry collaborations: Determinants and impact on graduates’ employability competencies. *Research Policy*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104172>
- Cheng, M., Adekola, O., Albia, J., & Cai, S. (2022). Employability in higher education: a review of key stakeholders’ perspective. *Higher Education Evaluation and Development*, 16(1), 16–31. <https://doi.org/10.1108/HEED-03-2021-0025>
- Fitri, D., & Khalid, Z. (2024). Pengaruh Kepercayaan Diri, Soft Skill Dan Dukungan Sosial Terhadap Employabilitas Generasi Z (Studi Pada Siswa/I Smk Ki Hajar Dewantoro Di Tangerang 2024). *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi (JEBISMA)*, 2(1), 1–8.
- Indrayana, F. M., & Kumaidi. (2021). Dukungan Sosial, Optimisme, Harapan dan Kesiapan Kerja Siswa. *Jurnal Sains Psikologi*, 10(2), 93–100.
- Indriati, P., & Djaddang, S. (2024). Mengevaluasi Peran Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Daya Saing Lulusan dan Prestise Institusi: Wawasan dari Teori Identitas Institusional dan Profesional yang Dinamis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Nusantara (JPKN)*, 2(3), 124–135.
- Laary, Y., Tulus, F. M. G., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(12), 60–67.
- Lane, C. (2024). *How to use the QS World University Rankings by Subject*. [topuniversities.com. https://www.topuniversities.com/subject-rankings/methodology](https://www.topuniversities.com/subject-rankings/methodology)
- Mukarom, Z., Laksana, M. W., & Nasrudin, E. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. Pustaka Setia.
- Pasaribu, M. H. (2021). Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 2(1), 38–46.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum*. Kementerian Hukum dan HAM.
- Posangi, H. A., Lengkong, F. D. J., & Dengo, S. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Purnama, A., Bintang, N. D., Pratiwi, T., Al-Fatih, M., Winata, C., & Aswaruddin, A. (2024). Kompetensi Dan Employability

- Dalam Peningkatan Kinerja Karyawan. *JURMA: Jurnal Riset Manajemen*, 2(1), 224–234.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jurma.v2i1.1384>
- Ratuella, Y. R. G., Nelwan, O. S., & Lumintang, G. G. (2022). Pengaruh Hard Skill, Soft Skill Dan Efikasi Diri Terhadap Kesiapan Kerja Pada Mahasiswa Akhir Jurusan Manajemen Feb Unsrat Manado. *Jurnal EMBA*, 10(1), 172–183.
- Rorimpandey, M. C., & Nurdin, I. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 11(1).
- Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Sallolo, Y., Aripin, S., & Raharjo, D. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen (Sim-Siluhtan) Dalam Pelaksanaan Program Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian Di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, 3(1).
- Sihite, M., & Saleh, A. (2019). Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi: Tinjauan Konseptual. *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX*, 2(1), 29 – 44.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); 2 ed.). CV. Alfabeta.
- Sunardi, Purnomo, & Sutadji, E. (2016). Pengembangan Employability Skills Siswa Smk Ditinjau Dari Implementasi Pendekatan Sainifik. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(7), 1391–1398.
- Tiwa, R. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(9).
- Tushar, H., & Sooraksa, N. (2023). Global employability skills in the 21st century workplace: A semi-systematic literature review. *Heliyon*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21023>
- Wijiharta, W., Yohana, A., Muhajirin, M., & Khairawati, S. (2021). Kerjasama Perguruan Tinggi dalam Pembinaan Skill Mahasiswa : Literatur Review. *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, 21(1), 1–17.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83–90.

